

Setya Novanto Minta Pansus

Angket DPR Terus Selidiki KPK

Jalan sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/11). Mantan anggota Komisi V DPR Fraksi PKB itu divonis hakim sembilan tahun penjara, denda Rp500 juta subsidi tiga bulan kurungan karena terbukti menerima suap sebesar Rp7 miliar dari Dirut PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.

Akhirnya PKPI-PBB-Idaman

Jadi Partai Peserta Pemilu 2019

JAKARTA (IM) - Bawaslu menyatakan meloloskan PKPI, PBB, dan Partai Idaman ke Pemilu 2019. Bawaslu menyatakan KPU telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara pendaftaran parpol melalui sipol.

Sidang ini digelar di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakpus, Rabu (15/11), dan dipimpin oleh Ketua Bawaslu

Abhan. Bawaslu menyatakan sipol bukan syarat wajib bagi parpol yang ingin mendaftar untuk Pemilu 2019. "Sipol bukan instrumen pendaftaran yang diperintahkan UU Pemilu sehingga sipol bukan kewajiban pendaftaran bagi partai politik untuk menjadi calon peserta pemilu," jelas Abhan.

Bawaslu memutuskan KPU harus memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran parpol. KPU juga diwajibkan memeriksa dokumen secara fisik. "Melakukan pemeriksaan dokumen secara fisik," kata Abhan dalam putusannya. Dengan demikian, syarat sipol untuk pendaftaran parpol peserta pemilu gugur. KPU diwajibkan mematuhi putusan ini 3 hari sejak pembacaan putusan. "Memerintahkan untuk melaksanakan putusan ini 3 hari kerja sejak pembacaan putusan," tutur Abhan. ● mei

PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Arsy Nusantara berkedudukan di Kota Surabaya ("Perseroan") nomor 27 tanggal 10 November 2017 yang dibuat dihadapan Martine, SH, Notaris di Jakarta, telah disetujui dan diputuskan sebagai berikut:

Persetujuan untuk meningkatkan modal dasar Perseroan semula Rp. 500.000.000,- menjadi menjadi Rp. 80.000.000.000,- serta meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan semula Rp. 180.000.000,- menjadi Rp. 80.000.000.000,- yang penyelesaiannya dilakukan dengan cara mengkonversi utang Perseroan kepada PT Ithaca Resources senilai Rp. 79.820.000.000,- sebagai pelunasan hutang Perseroan kepada PT Ithaca Resources.

Barang siapa yang berkeberatan dapat menyampaikan keberataannya kepada Perseroan di alamat korespondensi Perseroan di: PT Arsy Nusantara, Gedung International Financial Centre, Tower 2, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav 22/23, Jakarta, 12920, Indonesia.

Jakarta, 16 November 2017
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN PEMBUBARAN PT. WISATA BALI JAWA JAKARTA

Berdasarkan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Wisata Bali Jawa Jakarta, tertanggal 09 November 2017, Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Wisata Bali Jawa Jakarta, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan") telah memutuskan membubarkan dan melikuidasi Perseroan serta telah menyetujui pengangkatan MARUSSA DESSY SETYO UTAMI sebagai Likuidator Perseroan. Kepada Para Pihak yang mempunyai kepentingan atau tagihan terhadap Perseroan, harap segera mengajukan tagihan-tagihannya disertai bukti-bukti yang sah dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Likuidator Perseroan pada alamat:

APT. Taman Basuna Unit 1029F Wisma Palembang,
Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan)

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan pasal 147 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Likuidator

PT. WISATA BALI JAWA JAKARTA

2 Polhukam



PT SILLO MARITIME PERDANA TBK.
berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Tanggal : Jumat, 8 Desember 2017

Waktu : Pukul 11.00 WIB - selesai

Tempat : Thamrin Nine Ballroom

Jl. MH. Thamrin No. 10, RT 14/RW 20, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta 10230.

Agenda Rapat Perseroan:

1. Persetujuan pengunduran diri Direktur Utama Perseroan dan perubahan susunan Direksi Perseroan

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui surat kabar International Media pada tanggal 1 November 2017.

2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.

3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 15 November 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB;

- b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 15 November 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

4. Pemegang Saham Perseroan yang behalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang ditentukan oleh Direksi ("Surat Kuasa") dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat.

5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan setiap hari kerja dan jam kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan Kantor Biro Administrasi Efek

PT Sillo Maritime Perdana Tbk PT Datindo Entrycom

Gedung The City Tower Jalan Hayam Wuruk No 28 lantai 2

Jalan M.H. Thamrin No. 81 Jakarta 10120

Jakarta Pusat

Telp (021) 3508077, Fax (021) 3508078

7. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor BAE, PT Datindo Entrycom.

- a. Para Pemegang Saham atau Kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya, Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk menyerahkan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya dari Pemegang Saham yang memberi kuasa dan Kuasa Pemegang Saham yang diberi kuasa.

- b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.

- c. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan KTUR atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

8. Untuk menjaga kelancaran Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 November 2017

Direksi Perseroan

363 perwira pria dan 17 orang Kowad serta 296 perwira muda Dikukpas TNI AD tahun 2017 yang terdiri dari 294 perwira pria dan 2 orang Kowad.

Pada Pelantikan Prasetya Perwira ini juga diambil sumpah perwira yang diwakili oleh perwira muda dari masing-masing agama.

Mulyono dalam amanatnya menyampaikan, perwira lulusan Dikukpas dan Dikukpas TNI AD telah digembleng dalam sebuah pendidikan untuk mengubah status dari bintanga menjadi perwira.

"Hari ini kalian telah menye-

lesaikan pendidikan dan mulai menapalkan langkah awal sebagai perwira TNI AD yang siap menyongsong tugas menjadi pimpinan di satuan sesuai dengan kecabangan masing-masing. Hal ini tentunya membawa kesempurnaan. ● mei

Fadel Muhammad akan Temui JK Untuk Bahas Kasus Setya Novanto

JAKARTA (IM) -Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Fadel Muhammad akan menemui mantan

Ketua Umum Partai Golkar, yang saat ini menjabat Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, untuk membahas kasus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, yang saat ini kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya mau ketemu Pak Jusuf Kalla dulu. Agenda ini (membahas Novanto)," kata Fadel di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/11). Namun, Fadel tak menyebutkan kan secara rinci kapan pertemuan itu akan dilakukannya. Meski demikian, Fadel meyakini Partai Golkar tetap solid meski ketua umumnya terjerat kasus korupsi.

"Golkar menyerahkan ke proses ini ke hukum. Saya ini kan sudah senior-senior. Kita serahkan proses hukumnya. Dar sana baru kita lihat langkah apa yang diambil. Karena kita

tidak bisa intervensi," jelasnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menolak bila partainya sedang tersandera kesolidannya karena Novanto terjerat tersangka.

Menurut Fadel, Golkar tak boleh mengambil langkah terburu-buru dan tetap melihat proses hukum yang sedang berjalan.

"Karena Golkar ini kan di akar rumputnya kuat. Jadi kita biarkan proses hukum," tutur Fadel.

Kesolidan Golkar, lanjut Fadel sudah terbukti saat Akbar Tandjung juga sempat terjerat kasus korupsi. Akbar pernah tersangkut kasus 'Bulog Gate' saat menjabat sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR. Namun, partai belambang pohon beringin itu justru memenangkan pemilu legislatif.

"Jangan lupa, dulu waktu Pak Akbar Tandjung (kena) Bulog Gate itu saya bendahara umumnya, Pak Novanto wakil saya. Kita proses semua dengan baik. Sampai keluar hukumnya. Dar sana baru kita lihat langkah apa yang diambil. Karena kita

tidak bisa intervensi," jelasnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menolak bila partainya sedang tersandera kesolidannya karena Novanto terjerat tersangka.

Menurut Fadel, Golkar tak boleh mengambil langkah terburu-buru dan tetap melihat proses hukum yang sedang berjalan.

"Karena Golkar ini kan di akar rumputnya kuat. Jadi kita biarkan proses hukum," tutur Fadel.

Kesolidan Golkar, lanjut Fadel sudah terbukti saat Akbar Tandjung juga sempat terjerat kasus korupsi. Akbar pernah tersangkut kasus 'Bulog Gate' saat menjabat sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR. Namun, partai belambang pohon beringin itu justru memenangkan pemilu legislatif.

"Jangan lupa, dulu waktu Pak Akbar Tandjung (kena) Bulog Gate itu saya bendahara umumnya, Pak Novanto wakil saya. Kita proses semua dengan baik. Sampai keluar hukumnya. Dar sana baru kita lihat langkah apa yang diambil. Karena kita

tidak bisa intervensi," jelasnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menolak bila partainya sedang tersandera kesolidannya karena Novanto terjerat tersangka.

Menurut Fadel, Golkar tak boleh mengambil langkah terburu-buru dan tetap melihat proses hukum yang sedang berjalan.

"Karena Golkar ini kan di akar rumputnya kuat. Jadi kita biarkan proses hukum," tutur Fadel.

Kesolidan Golkar, lanjut Fadel sudah terbukti saat Akbar Tandjung juga sempat terjerat kasus korupsi. Akbar pernah tersangkut kasus 'Bulog Gate' saat menjabat sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR. Namun, partai belambang pohon beringin itu justru memenangkan pemilu legislatif.

"Jangan lupa, dulu waktu Pak Akbar Tandjung (kena) Bulog Gate itu saya bendahara umumnya, Pak Novanto wakil saya. Kita proses semua dengan baik. Sampai keluar hukumnya. Dar sana baru kita lihat langkah apa yang diambil. Karena kita

tidak bisa intervensi," jelasnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menolak bila partainya sedang tersandera kesolidannya karena Novanto terjerat tersangka.

Menurut Fadel, Golkar tak boleh mengambil langkah terburu-buru dan tetap melihat proses hukum yang sedang berjalan.

"Karena Golkar ini kan di akar rumputnya kuat. Jadi kita biarkan proses hukum," tutur Fadel.

Kesolidan Golkar, lanjut Fadel sudah terbukti saat Akbar Tandjung juga sempat terjerat kasus korupsi. Akbar pernah tersangkut kasus 'Bulog Gate' saat menjabat sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR. Namun, partai belambang pohon beringin itu justru memenangkan pemilu legislatif.

"Jangan lupa, dulu waktu Pak Akbar Tandjung (kena) Bulog Gate itu saya bendahara umumnya, Pak Novanto wakil saya. Kita proses semua dengan baik. Sampai keluar hukumnya. Dar sana baru kita lihat langkah apa yang diambil. Karena kita

tidak bisa intervensi," jelasnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menolak bila partainya sedang tersandera kesolidannya karena Novanto terjerat tersangka.

Menurut Fadel, Golkar tak boleh mengambil langkah terburu-buru dan tetap melihat proses hukum yang sedang berjalan.

"Karena Golkar ini kan di akar rumputnya kuat. Jadi kita biarkan proses hukum," tutur Fadel.

Kesolidan Golkar, lanjut Fadel sudah terbukti saat Akbar Tandjung juga sempat terjerat kasus korupsi. Akbar pernah tersangkut kasus 'Bulog Gate' saat menjabat sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR. Namun, partai belambang pohon beringin itu justru memenangkan pemilu legislatif.

"Jangan lupa, dulu waktu Pak Akbar Tandjung (kena) Bulog Gate itu saya bendahara umumnya, Pak Novanto wakil saya. Kita proses semua dengan baik. Sampai keluar hukumnya. Dar sana baru kita lihat langkah apa yang diambil. Karena kita

tidak bisa intervensi," jelasnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menolak bila partainya sedang tersandera kesolidannya karena Novanto terjerat tersangka.

Menurut Fadel, Golkar tak boleh mengambil langkah terburu-buru dan tetap melihat proses hukum yang sedang berjalan.

"Karena Golkar ini kan di akar rumputnya kuat. Jadi kita biarkan proses hukum," tutur Fadel.

Kesolidan Golkar, lanjut Fadel sudah terbukti saat Akbar Tandjung juga sempat terjerat kasus korupsi. Akbar pernah tersangkut kasus 'Bulog Gate' saat menjabat sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR. Namun, partai belambang pohon beringin itu justru memenangkan pemilu legislatif.

"Jangan lupa, dulu waktu Pak Akbar Tandjung (kena) Bulog Gate itu saya bendahara umumnya, Pak Novanto wakil saya. Kita proses semua dengan baik. Sampai keluar hukumnya. Dar sana baru kita lihat langkah apa yang diambil. Karena kita

tidak bisa intervensi," jelasnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menolak bila partainya sedang tersandera kesolidannya karena Novanto terjerat tersangka.

Menurut Fadel, Golkar tak boleh mengambil langkah terburu-buru dan tetap melihat proses hukum yang sedang berjalan.

"Karena Golkar ini kan di akar rumputnya kuat. Jadi kita biarkan proses hukum," tutur Fadel.

Kesolidan Golkar, lanjut Fadel sudah terbukti saat Akbar Tandjung juga sempat terjerat kasus korupsi. Akbar pernah tersangkut kasus 'Bulog Gate' saat menjabat sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR. Namun, partai belambang pohon beringin itu justru memenangkan pemilu legislatif.

"Jangan lupa, dulu waktu Pak Akbar Tandjung (kena) Bulog Gate itu saya bendahara umumnya, Pak Novanto wakil saya. Kita proses semua dengan baik. Sampai keluar hukumnya. Dar sana baru kita lihat langkah apa yang diambil. Karena kita

tidak bisa intervensi," jelasnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menolak bila partainya sedang tersandera kesolidannya karena Novanto terjerat tersangka.

Menurut Fadel, Golkar tak boleh mengambil langkah terburu-buru dan tetap melihat proses hukum yang sedang berjalan.

"Karena Golkar ini kan di akar rumputnya kuat. Jadi kita biarkan proses hukum," tutur Fadel.

Kesolidan Golkar, lanjut Fadel sudah terbukti saat Akbar Tandjung juga sempat terjerat kasus korupsi. Akbar pernah tersangkut kasus 'Bulog Gate' saat menjabat sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR. Namun, partai belambang pohon beringin itu justru memenangkan pemilu legislatif.

"Jangan lupa, dulu waktu Pak Akbar Tandjung (kena) Bulog Gate itu saya bendahara umumnya, Pak Novanto wakil saya. Kita proses semua dengan baik. Sampai keluar hukumnya. Dar sana baru kita lihat langkah apa yang diambil. Karena kita

tidak bisa intervensi," jelasnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menolak bila partainya sedang tersandera kesolidannya karena Novanto terjerat tersangka.

Menurut Fadel, Golkar tak boleh mengambil langkah terburu-buru dan tetap melihat proses hukum yang sedang berjalan.

"Karena Golkar ini kan di akar rumputnya kuat. Jadi kita biarkan proses hukum," tutur Fadel.

Kesolidan Golkar, lanjut Fadel sudah terbukti saat Akbar Tandjung juga sempat terjerat kasus korupsi. Akbar pernah tersangkut kasus 'Bulog Gate' saat menjabat sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR. Namun, partai belambang pohon beringin itu justru memenangkan pemilu legislatif.

"Jangan lupa, dulu waktu Pak Akbar Tandjung (kena) Bulog Gate itu saya bendahara umumnya, Pak Novanto wakil saya. Kita proses semua dengan baik. Sampai keluar hukumnya. Dar sana baru kita lihat langkah apa yang diambil. Karena kita

tidak bisa intervensi," jelasnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menolak bila partainya sedang tersandera kesolidannya karena Novanto terjerat tersangka.

Menurut Fadel, Golkar tak boleh mengambil langkah terburu-buru dan tetap melihat proses hukum yang sedang berjalan.

"Karena Golkar ini kan di akar rumputnya kuat. Jadi kita biarkan proses hukum," tutur Fadel.

Kesolidan Golkar, lanjut Fadel sudah terbukti saat Akbar Tandjung juga sempat terjerat kasus korupsi. Akbar pernah tersangkut kasus 'Bulog Gate' saat menjabat sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR. Namun, partai belambang pohon beringin itu justru memenangkan pemilu legislatif.

"Jangan lupa, dulu waktu Pak Akbar Tandjung (kena) Bulog Gate itu saya bendahara umumnya, Pak Novanto wakil saya. Kita proses semua dengan baik. Sampai keluar hukumnya. Dar sana baru kita lihat langkah apa yang diambil. Karena kita

tidak bisa intervensi," jelasnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menolak bila partainya sedang tersandera kesolidannya karena Novanto terjerat tersangka.

Menurut Fadel, Golkar tak boleh mengambil langkah terburu-buru dan tetap melihat proses hukum yang sedang berjalan.

"Karena Golkar ini kan di akar rumputnya kuat. Jadi kita biarkan proses hukum," tutur Fadel.

Kesolidan Golkar, lanjut Fadel sudah terbukti saat Akbar Tandjung juga sempat terjerat kasus korupsi. Akbar pernah tersangkut kasus 'Bulog Gate' saat menjabat sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR. Namun, partai belambang pohon beringin itu justru memenangkan pemilu legislatif.

"Jangan lupa, dulu waktu Pak Akbar Tandjung (kena) Bulog Gate itu saya bendahara umumnya, Pak Novanto wakil saya. Kita proses semua dengan baik. Sampai keluar hukumnya. Dar sana baru kita lihat langkah apa yang diambil. Karena kita

tidak bisa intervensi," jelasnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menolak bila partainya sedang tersandera kesolidannya karena Novanto terjerat tersangka.

Menurut Fadel, Golkar tak boleh mengambil langkah terburu-buru dan tetap melihat proses hukum yang sedang berjalan.

"Karena Golkar ini kan di akar rumputnya kuat. Jadi kita biarkan proses hukum," tutur Fadel.

Kesolidan Golkar, lanjut Fadel sudah terbukti saat Akbar Tandjung juga sempat terjerat kasus korupsi. Akbar pernah tersangkut kasus 'Bulog Gate' saat menjabat sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR. Namun, partai belambang pohon beringin itu justru memenangkan pemilu legislatif.

"Jangan lupa, dulu waktu Pak Akbar Tandjung (kena) Bulog Gate itu saya bendahara umumnya, Pak Novanto wakil saya. Kita proses semua dengan baik. Sampai keluar hukumnya. Dar sana baru kita lihat langkah apa yang diambil. Karena kita

tidak bisa intervensi," jelasnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menolak bila partainya sedang tersandera kesolidannya karena Novanto terjerat tersangka.

Menurut Fadel, Golkar tak boleh mengambil langkah terburu-buru dan tetap melihat proses hukum yang sedang berjalan.

"Karena Golkar ini kan di akar rumputnya kuat. Jadi kita biarkan proses hukum," tutur Fadel.

Kesolidan Golkar, lanjut Fadel sudah terbukti saat Akbar Tandjung juga sempat terjerat kasus korupsi. Akbar pernah tersangkut kasus 'Bulog Gate' saat menjabat sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR. Namun, partai belambang pohon beringin itu justru memenangkan pemilu legislatif.

"Jangan lupa, dulu waktu Pak Akbar Tandjung (kena) Bulog Gate itu saya bendahara umumnya, Pak Novanto wakil saya. Kita proses semua dengan baik. Sampai keluar hukumnya. Dar sana baru kita lihat langkah apa yang diambil. Karena kita

tidak bisa intervensi," jelasnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menolak bila partainya sedang tersandera kesolidannya karena Novanto terjerat tersangka.

Menurut Fadel, Golkar tak boleh mengambil langkah terburu-buru dan tetap melihat proses hukum yang sedang berjalan.

"Karena Golkar ini kan di akar rumputnya kuat. Jadi kita biarkan proses hukum," tutur Fadel.

Kesolidan Golkar, lanjut Fadel sudah terbukti saat Akbar Tandjung juga sempat terjerat kasus korupsi. Akbar pernah tersangkut kasus 'Bulog Gate' saat menjabat sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR. Namun, partai belambang pohon beringin itu justru memenangkan pemilu legislatif.

"Jangan lupa, dulu waktu Pak Akbar Tandjung (kena) Bulog Gate itu saya bendahara umumnya, Pak Novanto wakil saya. Kita proses semua dengan baik. Sampai keluar hukumnya. Dar sana baru kita lihat langkah apa yang diambil. Karena kita

tidak bisa intervensi," jelasnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menolak bila partainya sedang tersandera kesolidannya karena Novanto terjerat tersangka.

Menurut Fadel, Golkar tak boleh mengambil langkah terburu-buru dan tetap melihat proses hukum yang sedang berjalan.

"Karena Golkar ini kan di akar rumputnya kuat. Jadi kita biarkan proses hukum," tutur Fadel.

Kesolidan Golkar, lanjut Fadel sudah terbukti saat Akbar Tandjung juga sempat terjerat kasus korupsi. Akbar pernah tersangkut kasus 'Bulog Gate' saat menjabat sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR. Namun, partai belambang pohon beringin itu justru memenangkan pemilu legislatif.

"Jangan lupa, dulu waktu Pak Akbar Tandjung (kena) Bulog Gate itu saya bendahara umumnya, Pak Novanto wakil saya. Kita proses semua dengan baik. Sampai keluar hukumnya. Dar sana baru kita lihat langkah apa yang diambil. Karena kita

tidak bisa intervensi," jelasnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menolak bila partainya sedang tersandera kesolidannya karena Novanto terjerat tersangka.

Menurut Fadel, Golkar tak boleh mengambil langkah terburu-buru dan tetap melihat proses hukum yang sedang berjalan.

"Karena Golkar ini kan di akar rumputnya kuat. Jadi kita biarkan proses hukum," tutur Fadel.

Kesolidan Golkar, lanjut Fadel sudah terbukti saat Akbar Tandjung juga sempat terjerat kasus korupsi. Akbar pernah tersangkut kasus 'Bulog Gate' saat menjabat sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR. Namun, partai belambang pohon beringin itu justru memenangkan pemilu legislatif.

"Jangan lupa, dulu waktu Pak Akbar Tandjung (kena) Bulog Gate itu saya bendahara umumnya, Pak Novanto wakil saya. Kita proses semua dengan baik. Sampai keluar hukumnya. Dar sana baru kita lihat langkah apa yang diambil. Karena kita

tidak bisa intervensi," jelasnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menolak bila partainya sedang tersandera kesolidannya karena Novanto terjerat tersangka.

Menurut Fadel, Golkar tak boleh mengambil langkah terburu-buru dan tetap melihat proses hukum yang sedang berjalan.

"Karena Golkar ini kan di akar rumputnya kuat. Jadi kita biarkan proses hukum," tutur Fadel.

Kesolidan Golkar, lanjut Fadel sudah terbukti saat Akbar Tandjung juga sempat terjerat kasus korupsi. Akbar pernah tersangkut kasus 'Bulog Gate' saat menjabat sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR. Namun, partai belambang pohon beringin itu justru memenangkan pemilu legislatif.

"Jangan lupa, dulu waktu Pak Akbar Tandjung (kena) Bulog Gate itu saya bendahara umumnya, Pak Novanto wakil saya. Kita proses semua dengan baik. Sampai keluar hukumnya. Dar sana baru kita lihat langkah apa yang diambil. Karena kita

tidak bisa intervensi," jelasnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menolak bila partainya sedang tersandera kesolidannya karena Novanto terjerat tersangka.

Menurut Fadel, Golkar tak boleh mengambil langkah terburu-buru dan tetap melihat proses hukum yang sedang berjalan.

"Karena Golkar ini kan di akar rumputnya kuat. Jadi kita biarkan proses hukum," tutur Fadel.

Kesolidan Golkar, lanjut Fadel sudah terbukti saat Akbar Tandjung juga sempat terjerat kasus korupsi. Akbar pernah tersangkut kasus 'Bulog Gate' saat menjabat sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR. Namun, partai belambang pohon beringin itu justru memenangkan pemilu legislatif.

"Jangan lupa, dulu waktu Pak Akbar Tandjung (kena) Bulog Gate itu saya bendahara umumnya, Pak Novanto wakil saya. Kita proses semua dengan baik. Sampai keluar hukumnya. Dar sana baru kita lihat langkah apa yang diambil. Karena kita

tidak bisa intervensi," jelasnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menolak bila partainya sedang tersandera kesolidannya karena Novanto terjerat tersangka.

Menurut Fadel, Golkar tak boleh mengambil langkah terburu-buru dan tetap melihat proses hukum yang sedang berjalan.